



**PUTUSAN**

Nomor 94/Pid.B/2024/PN Rbg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. SYAFI' ILHAMI Bin MUNTOHA**
2. Tempat lahir : Rembang
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/ 9 Juni 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tasikharjo RT. 003 RW. 001, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2025;

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 94/Pid.B/2024/PN Rbg tanggal 29 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.B/2024/PN Rbg tanggal 29 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD SYAFI' ILHAMI Bin (Alm) MUNTOHA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta melakukan penggelapan**" sesuai dakwaan Alternatif kedua Kami sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD SYAFI' ILHAMI Bin (Alm) MUNTOHA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun potong tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar surat tanda bukti gadai nomor 13764-22-01-004160-6 atas nama WARSITO Alamat Desa Tasik Agung RT.001 RW.001 Kec. Rembang Kab. Rembang yang dikeluarkan di Unit UPC Pasar Rembang tanggal 27 Agustus 2022;
  - 1 (satu) buah BPKB KBM Honda Brio warna kuning pekat tahun 2020 dengan Nomor Polisi : K-1570-VD, Nomor Rangka: MHRDD1750LJ903550, Nomor Mesin: L12B32401580 atas nama pemilik WIWIK WISAYATI Alamat Desa Kumendung RT.002 RW.004 Kec. Rembang Kab. Rembang.

**Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa WARTONO Bin RADIMIN.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor register PDM-47/M.3.21/Eoh.2/11/2024 tanggal 26 November 2024 sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD SYAFI' ILHAMI Bin (Alm) MUNTOHA bersama-sama dengan Saksi WARTONO BIN RADIMIN (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di rumah Saksi HANANTO turut tanah Desa Kumendung Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang, "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Saksi DAMSINAR dan mengatakan akan menyewa 1 (satu) unit KBM Honda Brio warna kuning pekat tahun 2020 dengan Nomor Polisi : K-1570-VD, Nomor Rangka : MHRDD1750LJ903550, Nomor Mesin : L12B32401580 atas nama pemilik WIWIK WIDAYATI Alamat Desa Kumendung Rt. 002 Rw. 004 Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang untuk keperluan kerja mengantarkan pengurus kapal selama 1 (satu) bulan.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa bersama istri Terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor Terdakwa datang ke rumah Saksi HANANTO (suami Saksi DAMSINAR) dan pada saat itu yang menyerahkan KBM Honda Brio, Kunci Kontak KBM dan STNK KBM tersebut kepada Terdakwa adalah Saksi HANANTO dan disaksikan oleh Saksi DAMSINAR dan pada saat itu KTP dari Terdakwa tidak diberikan kepada Saksi HANANTO dikarenakan sebelumnya sudah kenal dan sering menyewa serta barang jaminan yang diberikan adalah surat pegadaian Emas.
- Bahwa Terdakwa menyewa KBM milik Saksi HANANTO dimulai tanggal 4 Oktober 2022 sampai tanggal 4 November 2022 dengan biaya sewa perbulannya Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) lalu diperpanjang lagi 1 (satu) bulan sampai tanggal 4 Desember 2022 lalu diperpanjang lagi 1 (satu) bulan sampai tanggal 4 Januari 2022 baru di bayarkan sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) yang seharusnya KBM milik Saksi HANANTO tersebut

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dikembalikan karena habis masa sewa nya tersebut namun tidak Terdakwa kembalikan kepada Saksi HANANTO.

- Bahwa selanjutnya 1 (satu) unit KBM Honda Brio warna kuning pekat tahun 2020 dengan Nomor Polisi : K-1570-VD, Nomor Rangka : MHRDD1750LJ903550, Nomor Mesin : L12B32401580 atas nama pemilik WIWIK WIDAYATI Alamat Desa Kumendung Rt. 002 Rw. 004 Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang tersebut telah digadaikan oleh Saksi WARTONO (dalam berkas terpisah) kepada Saksi LELES Alias KADAL (DPO) alamat Desa Tlogotunggal Kec. Sumber Kab. Rembang sebesar Rp.40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah). Dari hasil penggadaian tersebut Terdakwa diberi uang oleh Saksi WARTONO sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah),
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, maka Saksi HANANTO mengalami kerugian sebesar Rp.180.000.000,- (Seratus delapan puluh juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD SYAFI' ILHAMI Bin (Alm) MUNTOHA bersama-sama dengan Saksi WARTONO BIN RADIMIN (dilakukan penuntutan terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dakwaan Pertama diatas, "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain , tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Saksi DAMSINAR dan mengatakan akan menyewa 1 (satu) unit KBM Honda Brio warna kuning pekat tahun 2020 dengan Nomor Polisi : K-1570-VD, Nomor Rangka : MHRDD1750LJ903550, Nomor Mesin : L12B32401580 atas nam pemilik WIWIK WIDAYATI Alamat Desa Kumendung Rt. 002 Rw. 004 Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang untuk keperluan kerja mengantarkan pengurus kapal selama 1 (satu) bulan.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa bersama istri Terdakwa dengan mengendarai

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SPM milik Terdakwa datang ke rumah Saksi HANANTO (suami Saksi DAMSINAR) dimana pada saat itu Saksi HANANTO yang menyerahkan KBM Honda Brio beserta kunci Kontak KBM dan STNK KBM tersebut kepada Terdakwa, Kunci Kontak KBM dan STNK KBM tersebut kepada Terdakwa dan disaksikan oleh Saksi DAMSINAR .

- Bahwa Terdakwa menyewa KBM tersebut karena disuruh oleh Saksi Wartono (dalam berkas terpisah) yang dimulai tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022 dengan biaya sewa perbulannya Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) lalu diperpanjang lagi 1 (satu) bulan sampai tanggal 4 Desember 2022 lalu diperpanjang lagi 1 (satu) bulan sampai tanggal 4 Januari 2022 baru di bayarkan sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) yang seharusnya KBM milik Saksi HANANTO tersebut sudah dikembalikan karena habis masa sewanya tersebut namun tidak Terdakwa kembalikan kepada Saksi HANANTO.

- Selanjutnya 1 (satu) unit KBM Honda Brio tersebut diserahkan kepada Saksi Wartono akan tetapi oleh Saksi Wartono KBM tersebut digadaikan kepada LELES Alias KADAL (DPO) sebesar Rp.40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah). Dari hasil penggadaian tersebut Terdakwa diberi uang oleh Saksi WARTONO (dalam berkas terpisah) sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah),

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, maka Saksi HANANTO mengalami kerugian sebesar Rp.180.000.000,- (Seratus delapan puluh juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Hananto bin Aris Suwodo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit Mobil Honda Brio warna kuning pekat tahun 2020 dengan nomor Polisi K-1570-VD yang merupakan milik Saksi yang telah Saksi sewakan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Oktober 2022 di rumah Saksi di Desa Kumendung, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, Istri Saksi yang bernama Damsinar dihubungi oleh Terdakwa melalui telepon dan Terdakwa menyampaikan akan menyewa 1 (satu) unit mobil untuk keperluan kerja mengantarkan pengurus kapal selama 1 (satu) bulan dimulai tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan 4 November 2022, kemudian pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2024 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa datang bersama istri Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna kuning pekat tahun 2020 dengan nomor Polisi K-1570-VD yang akan disewa, kemudian Saksi menyerahkan mobil, kunci kontak, beserta STNK mobil tersebut kepada Terdakwa dengan disaksikan Istri Saksi;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil tersebut untuk 1 (satu) bulan sewa dimulai tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan 4 November 2022 serta menyerahkan 1 (satu) lembar surat gadai emas sebagai jaminan, dan tidak Saksi mintai KTP karena Saksi sudah mengenal Terdakwa sebelumnya yang mana uang sewa selama 1 (satu) bulan telah dibayarkan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa melakukan perpanjangan sewa selama 1 (satu) bulan sampai dengan tanggal 4 Desember 2022 dengan pembayaran sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kemudian diperpanjang lagi selama 1 (satu) bulan sampai tanggal 4 Januari 2023 namun baru dilakukan pembayaran sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan setelah masa sewa habis, mobil milik Saksi tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi Terdakwa dan menyampaikan jika mobil yang disewa telah jatuh tempo namun belum dikembalikan, kemudian Terdakwa mengatakan jika mobil tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa bersama Wartono;
- Bahwa kemudian pada tanggal 5 Januari 2023 Saksi bersama Istri Saksi mendatangi rumah Terdakwa namun hanya bertemu Istri Terdakwa, kemudian Saksi menelpon Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Saksi untuk datang ke rumah Wartono, kemudian Saksi diantar oleh Istri Terdakwa pergi ke rumah Wartono namun hanya bertemu dengan Istri Wartono, kemudian Saksi berpesan kepada Istri Terdakwa maupun Istri Wartono agar menyuruh Terdakwa dan Wartono datang ke rumah Saksi untuk mempertanggung jawabkan dan mengembalikan mobil milik Saksi;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian tanggal 6 Januari 2023 Terdakwa bersama Wartono datang ke rumah Saksi dan membuat surat pernyataan yang menyatakan pada pokoknya sanggup bertanggung jawab mengembalikan mobil tersebut beserta biaya sewa sampai tanggal 4 Februari 2023 dengan di saksikan oleh Saksi Suradi, akan tetapi hingga saat ini Terdakwa dan Wartono tidak mengembalikan mobil tersebut;

- Bahwa atas kehilangan mobil tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Saksi Damsinar Manurung binti Togu An Manurung** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Hananto yang merupakan Suami Saksi, telah kehilangan 1 (satu) unit Mobil Honda Brio warna kuning pekat tahun 2020 dengan nomor Polisi K-1570-VD yang merupakan milik Suami Saksi yang telah disewakan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Oktober 2022 di rumah Saksi di Desa Kumendung, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang;

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui Telepon dan Terdakwa menyampaikan akan menyewa 1 (satu) unit mobil untuk keperluan kerja mengantarkan pengurus kapal selama 1 (satu) bulan dimulai tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan 4 November 2022, kemudian pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2024 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa datang bersama istri Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna kuning pekat tahun 2020 dengan nomor Polisi K-1570-VD yang akan disewa, kemudian Suami Saksi menyerahkan mobil, kunci kontak, beserta STNK mobil tersebut kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi;

- Bahwa Terdakwa menyewa mobil tersebut untuk 1 (satu) bulan sewa dimulai tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan 4 November 2022 serta menyerahkan 1 (satu) lembar surat gadai emas sebagai jaminan, dan tidak dimintai KTP karena sudah mengenal Terdakwa sebelumnya yang mana uang sewa selama 1 (satu) bulan telah dibayarkan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa melakukan perpanjangan sewa selama 1 (satu) bulan sampai dengan tanggal 4 Desember 2022 dengan pembayaran sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kemudian



diperpanjang lagi selama 1 (satu) bulan sampai tanggal 4 Januari 2023 namun baru dilakukan pembayaran sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan setelah masa sewa habis, mobil milik Suami Saksi tidak dikembalikan oleh Terdakwa;

- Bahwa kemudian Suami Saksi menghubungi Terdakwa dan menyampaikan jika mobil yang disewa telah jatuh tempo namun belum dikembalikan, kemudian Terdakwa mengatakan jika mobil tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa bersama Wartono;

- Bahwa kemudian pada tanggal 5 Januari 2023 Saksi bersama Suami Saksi mendatangi rumah Terdakwa namun hanya bertemu Istri Terdakwa, kemudian Suami Saksi menelpon Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Suami Saksi untuk datang ke rumah Wartono, kemudian Saksi dan Suami Saksi diantar oleh Istri Terdakwa pergi ke rumah Wartono namun hanya bertemu dengan Istri Wartono, kemudian Suami Saksi berpesan kepada Istri Terdakwa maupun Istri Wartono agar menyuruh Terdakwa dan Wartono datang ke rumah Saksi untuk mempertanggung jawabkan dan mengembalikan mobil milik Suami Saksi;

- Bahwa kemudian tanggal 6 Januari 2023 Terdakwa bersama Wartono datang ke rumah Saksi dan membuat surat pernyataan yang menyatakan pada pokoknya sanggup bertanggung jawab mengembalikan mobil tersebut beserta biaya sewa sampai tanggal 4 Februari 2023 dengan di saksikan Saksi Suradi, akan tetapi hingga saat ini Terdakwa dan Wartono tidak mengembalikan mobil tersebut;

- Bahwa atas kehilangan mobil tersebut, Suami Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Wartono yang merupakan Bos Terdakwa telah menyewa 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna kuning pekat tahun 2020 dengan nomor Polisi K-1570 VD namun tidak dikembalikan dan telah digadaikan kepada orang lain tanpa izin pemiliknya;
- Bahwa awalnya di bulan Oktober 2022, Wartono yang merupakan Bos Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk menyewa mobil kemudian pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 07.00 WIB di rumah Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Damsinar dan Saksi Hananto di Desa Kumendung, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna kuning pekat tahun 2020 dengan nomor Polisi K-1570-VD milik Saksi Damsinar dan Saksi Hananto, yang mana uang sewa telah diberikan Wartono kepada Terdakwa sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan telah Terdakwa bayarkan lunas kepada Saksi Damsinar dan Saksi Hananto untuk sewa selama 1 (satu) bulan sejak tanggal 4 Oktober 2022 dan pada saat itu juga Saksi Hananto menyerahkan mobil, kunci kontak, beserta STNK mobil tersebut kepada Terdakwa, dan juga Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar surat gadai emas sebagai jaminan;

- Bahwa kemudian sekitar bulan November 2022, Wartono meminta Terdakwa untuk memperpanjang sewa selama 1 (satu) bulan sampai dengan 4 Desember 2022 dengan memberikan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa, yang kemudian dibayarkan oleh Terdakwa kepada Saksi Damsinar dan Saksi Hananto;
- Bahwa kemudian sekitar bulan Desember 2022, Wartono kembali meminta Terdakwa untuk memperpanjang sewa selama 1 (satu) bulan sampai dengan 4 Januari 2023 dengan memberikan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Terdakwa, yang kemudian dibayarkan oleh Terdakwa kepada Saksi Damsinar dan Saksi Hananto;
- Bahwa kemudian sekitar pertengahan bulan Desember 2022, Wartono menyuruh Terdakwa untuk mengantar mobil Brio tersebut kepada Leles di TPI Tasik Agung untuk digadaikan dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan potongan biaya administrasi dari Leles sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga hasil gadai yang diterima Terdakwa atas mobil tersebut adalah Rp37.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kemudian uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Wartono;
- Bahwa kemudian Wartono memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan tujuan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai upah kerja menjual ikan dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai upah uang hasil gadai;
- Bahwa setelah tanggal jatuh tempo sewa, Terdakwa telah dihubungi oleh Saksi Hananto yang mulai menanyakan mobil tersebut kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa mobil tersebut telah digadaikan bersama dengan Wartono;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tanggal 6 Januari 2023, Terdakwa datang bersama Wartono ke rumah Saksi Hananto untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan pada pokoknya sanggup bertanggung jawab mengembalikan mobil tersebut beserta biaya sewa sampai tanggal 4 Februari 2023 dengan di saksikan Saksi Suradi, akan tetapi hingga saat ini Terdakwa dan Wartono tidak mengembalikan mobil tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Wartono menggadaikan mobil tersebut adalah untuk mendapatkan uang dan digunakan untuk keperluan Wartono dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Leles dan mobil Brio tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama Wartono menggadaikan mobil tersebut kepada orang lain adalah tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, di muka persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan bagi dirinya (Saksi *a de charge*), namun ternyata Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat tanda bukti gadai Nomor 13764-01-004160-6 atas nama Warsito alamat Ds. Tasikagung Rt. 001 Rw.001 Kec.Rembang Kab. Rembang yang dikeluarkan di Unit Pegadaian Pasar (UPC) Rembang tanggal 27 Agustus 2022;
- 1 (satu) buah BPKB KBM Honda Brio warna kuning tahun 2020 dengan Nopol K-1570-VD, Noka : MHRDD1750LJ903550, Nosin : L12B32401580 atas nama Wiwik Widayati Alamat Ds. Kumendung Rt. 002 Rw. 004 Kec.Rembang Kab. Rembang.

**Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:**

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Wartono yang merupakan Bos Terdakwa telah menyewa 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna kuning pekat tahun 2020 dengan nomor Polisi K-1570 VD namun tidak dikembalikan dan telah digadaikan kepada orang lain tanpa izin pemiliknya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya di bulan Oktober 2022, Wartono yang merupakan Bos Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk menyewa mobil kemudian pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 07.00 WIB di rumah Saksi Damsinar dan Saksi Hananto di Desa Kumendung, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna kuning pekat tahun 2020 dengan nomor Polisi K-1570-VD milik Saksi Damsinar dan Saksi Hananto, yang mana uang sewa telah diberikan Wartono kepada Terdakwa sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan telah Terdakwa bayarkan lunas kepada Saksi Damsinar dan Saksi Hananto untuk sewa selama 1 (satu) bulan sejak tanggal 4 Oktober 2022 dan pada saat itu juga Saksi Hananto menyerahkan mobil, kunci kontak, beserta STNK mobil tersebut kepada Terdakwa, dan juga Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar surat gadai emas sebagai jaminan;
- Bahwa kemudian sekitar bulan November 2022, Wartono meminta Terdakwa untuk memperpanjang sewa selama 1 (satu) bulan sampai dengan 4 Desember 2022 dengan memberikan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa, yang kemudian dibayarkan oleh Terdakwa kepada Saksi Damsinar dan Saksi Hananto;
- Bahwa kemudian sekitar bulan Desember 2022, Wartono kembali meminta Terdakwa untuk memperpanjang sewa selama 1 (satu) bulan sampai dengan 4 Januari 2023 dengan memberikan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Terdakwa, yang kemudian dibayarkan oleh Terdakwa kepada Saksi Damsinar dan Saksi Hananto;
- Bahwa kemudian sekitar pertengahan bulan Desember 2022, Wartono menyuruh Terdakwa untuk mengantar mobil Brio tersebut kepada Leles di TPI Tasik Agung untuk digadaikan dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan potongan biaya administrasi dari Leles sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga hasil gadai yang diterima Terdakwa atas mobil tersebut adalah Rp37.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kemudian uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Wartono;
- Bahwa kemudian Wartono memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan tujuan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai upah kerja menjual ikan dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai upah uang hasil gadai;
- Bahwa setelah tanggal jatuh tempo sewa, Terdakwa telah dihubungi oleh Saksi Hananto yang mulai menanyakan mobil tersebut kemudian

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Rbg



Terdakwa menyampaikan bahwa mobil tersebut telah digadaikan bersama dengan Wartono;

- Bahwa pada tanggal 6 Januari 2023, Terdakwa datang bersama Wartono ke rumah Saksi Hananto untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan pada pokoknya sanggup bertanggung jawab mengembalikan mobil tersebut beserta biaya sewa sampai tanggal 4 Februari 2023 dengan di saksikan Saksi Suradi, akan tetapi hingga saat ini Terdakwa dan Wartono tidak mengembalikan mobil tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Wartono menggadaikan mobil tersebut adalah untuk mendapatkan uang dan digunakan untuk keperluan Wartono dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Leles dan mobil Brio tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama Wartono menggadaikan mobil tersebut kepada orang lain adalah tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa atas perbuatan Wartono dan Terdakwa, Saksi Hananto mengalami kerugian sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki secara melawan hukum barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1. Unsur barang siapa;**



Menimbang, bahwa unsur barangsiapa ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/ kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barangsiapa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga barangsiapa menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dari Surat Dakwaan Penuntut Umum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Terdakwa **M. Syafi' Ilhami bin Muntoha** yang mana setelah diperiksa di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga jelaslah bahwa unsur barangsiapa ini tertuju kepada Terdakwa tersebut sehingga tidak terjadi *error in person*, oleh karenanya unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Dengan sengaja memiliki secara melawan hukum barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,**

Menimbang, bahwa menurut Mr. J.M. van Bemmelen, sengaja ialah **kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan** perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang (buku Hukum Pidana 1 – Hukum Pidana Material Bagian Umum, Penerbit Binacipta, Cet. VI,1984, hal. 113);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara, S.H., seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus **menghendaki (willen)** perbuatan itu serta harus **menginsafi mengerti (weten) akan akibat dari perbuatannya itu** (lihat buku Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Kesatu, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal. 291);

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. van Hamel, dalam bukunya *Inleiding tot de studie van het Nederlanse Strafrecht*, 1927, hal. 284, disebutkan pada delik-delik yang oleh undang-undang telah dinyatakan bahwa delik-delik itu harus dilakukan dengan sengaja, *opzet* itu hanya dapat ditujukan kepada:

- Tindakan-tindakan, baik tindakan untuk melakukan sesuatu maupun tindakan untuk tidak melakukan sesuatu;



- Tindakan itu menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh Undang-Undang;
- Dipenuhinya unsur-unsur selebihnya dari delik yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” pada pokoknya menyangkut sikap batin seseorang yang tidak bisa tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai manifestasi (wujud) dari sikap sengaja tersebut. Menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan yang dilakukannya itu. Mengetahui berarti si pelaku sebelum melakukan suatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut seandainya dilakukan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan itu;

Menimbang bahwa **melawan hukum** (*wederrechtelijk*) secara doktrin memiliki makna:

1. Bertentangan dengan hukum pada umumnya/ *in strijd met het recht in algemeen* (Simons);
2. Bertentangan dengan hukum, yang mempunyai pengertian yang lebih luas dari sekedar bertentangan dengan Undang-Undang/ *in strijd met de wet* (Pompe);
3. Bertentangan dengan hukum tertulis/ *in strijd met het geschreven recht* (va Bemmelen dan van Hattum);
4. Tanpa hak/ *zonder eigen recht* atau tanpa kewenangan/ *zonder bevoegdheid* (Hazewinkel-Suringa).

Secara melawan hukum (*wederrechtelijke*) berarti pelaku melakukan perbuatan itu tanpa hak atau kekuasaan, tanpa minta izin lebih dahulu dari orang yang berhak, bertentangan dengan hak orang lain, menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

**Menimbang, bahwa memiliki** adalah setiap tindakan penguasaan atas barang/benda atau tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, sehingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.69K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959 disebutkan bahwa unsur “memiliki” dalam pasal 372 KUHP berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu. Atau Putusan Mahkamah Agung No. 83K/Kr/1956 tanggal 8 Mei 1957 yang memberikan makna memiliki berupa menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta hukum Terdakwa bersama dengan Wartono yang merupakan Bos Terdakwa telah menyewa 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna kuning pekat tahun 2020 dengan nomor Polisi K-1570 VD namun tidak dikembalikan dan telah digadaikan kepada orang lain tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan awalnya di bulan Oktober 2022, Wartono yang merupakan Bos Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk menyewa Mobil kemudian pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 07.00 WIB di rumah Saksi Damsinar dan Saksi Hananto di Desa Kumendung Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna kuning pekat tahun 2020 dengan nomor Polisi K-1570 VD milik Saksi Damsinar dan Saksi Hananto, yang mana uang sewa telah diberikan Wartono kepada Terdakwa sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan telah Terdakwa bayarkan lunas kepada Saksi Damsinar dan Saksi Hananto untuk sewa selama 1 (satu) bulan sejak tanggal 4 Oktober 2022 dan pada saat itu juga Saksi Hananto menyerahkan mobil, kunci kontak, beserta STNK mobil tersebut kepada Terdakwa, dan juga Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar surat gadai emas sebagai jaminan;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar bulan November 2022, Wartono meminta Terdakwa untuk memperpanjang sewa selama 1 (satu) bulan sampai dengan 4 Desember 2022 dengan memberikan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa, yang kemudian dibayarkan oleh Terdakwa kepada Saksi Damsinar dan Saksi Hananto;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar bulan Desember 2022, Wartono kembali meminta Terdakwa untuk memperpanjang sewa selama 1 (satu) bulan sampai dengan 4 Januari 2023 dengan memberikan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Terdakwa, yang kemudian dibayarkan oleh Terdakwa kepada Saksi Damsinar dan Saksi Hananto;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pertengahan bulan Desember 2022, Wartono menyuruh Terdakwa untuk mengantar mobil Brio tersebut kepada Leles di TPI Tasik Agung untuk digadaikan dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan potongan biaya administrasi dari Leles sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga hasil gadai yang diterima Terdakwa atas mobil tersebut adalah Rp37.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kemudian uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Wartono;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Wartono memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan tujuan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai upah kerja menjual ikan dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai upah uang hasil gadai;

Menimbang, bahwa setelah tanggal jatuh tempo sewa, Terdakwa telah dihubungi oleh Saksi Hananto yang mulai menanyakan mobil tersebut kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa mobil tersebut telah digadaikan bersama dengan Wartono;

Menimbang, bahwa pada tanggal 6 Januari 2023, Terdakwa datang bersama Wartono ke rumah Saksi Hananto untuk membuat surat pernyataan dengan di Saksikan Saksi Suradi yang menyatakan pada pokoknya sanggup bertanggung jawab mengembalikan mobil tersebut beserta biaya sewa sampai tanggal 4 Februari 2023, akan tetapi hingga saat ini Terdakwa dan Wartono tidak mengembalikan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Wartono menggadaikan mobil tersebut adalah untuk mendapatkan uang dan digunakan untuk keperluan Wartono dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Wartono menggadaikan mobil tersebut kepada orang lain adalah tanpa seizin pemiliknya dan atas perbuatan Wartono dan Terdakwa, Saksi Hananto mengalami kerugian sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena mobil tersebut merupakan milik Saksi Hananto dan bukan merupakan milik Terdakwa maupun Wartono, **maka Terdakwa bersama dengan Wartono tidak dibenarkan untuk menggadaikan mobil tersebut dan menggunakan uang hasil gadai tersebut tanpa seizin dari Saksi Hananto** dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa menghendaki, menginsyafi dan mengetahui perbuatannya tersebut dilakukan tanpa hak serta akibat perbuatannya dapat merugikan Saksi Hananto, oleh karenanya unsur **dengan sengaja memiliki secara melawan hukum barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain**, harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

### **Ad.3 tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, Bahwa menurut *Arrest Hoge Raad*, masing-masing:

- Tanggal 14 April 1913 disebutkan bahwa benda yang berada di bawah kekuasaannya adalah benda atas mana si pelaku telah menguasainya secara mutlak dan nyata, dengan tidak perlu memperhatikan apakah

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penguasaan itu dilakukan oleh si pelaku sendiri secara pribadi atau oleh orang lain. Di dalam pengertian ini termasuk juga apabila benda tersebut disimpan oleh pihak ketiga atas permintaan si pelaku;

- Tanggal 25 Juni 1946 disebutkan bahwa pengertian “berada di bawah kekuasaannya” adalah bahwa terdapat hubungan yang langsung dan nyata antara si pelaku dengan barang yang dikuasainya;

- Tanggal 31 Desember 1931 disebutkan bahwa pengertian “berada di bawah kekuasaannya” adalah bahwa si pelaku menguasai benda itu secara mutlak dan nyata, yang karenanya ia dapat memperlakukan benda tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya; (lihat buku Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik, karangan Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, S.H., penerbit Tarsito, Bandung, edisi kedua, 1990, hal 130-131);

Menimbang, bahwa kejahatan menurut R. Soesilo adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang/perbuatan melawan hukum;

**Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta hukum** Terdakwa bersama dengan Wartono yang merupakan Bos Terdakwa telah menyewa 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna kuning pekat tahun 2020 dengan nomor Polisi K-1570 VD namun tidak dikembalikan dan telah digadaikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa awalnya di bulan Oktober 2022 Wartono yang merupakan Bos Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk menyewa Mobil kemudian pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 07.00 WIB di rumah Saksi Damsinar dan Saksi Hananto di Desa Kumendung Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna kuning pekat tahun 2020 dengan nomor Polisi K-1570 VD milik Saksi Damsinar dan Saksi Hananto, yang mana uang sewa telah diberikan Wartono kepada Terdakwa sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan telah Terdakwa bayarkan lunas kepada Saksi Damsinar dan Saksi Hananto untuk sewa selama 1 (satu) bulan sejak tanggal 4 Oktober 2022 dan pada saat itu juga Saksi Hananto menyerahkan mobil, kunci kontak, beserta STNK mobil tersebut kepada Terdakwa, dan juga Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar surat gadai emas sebagai jaminan;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar bulan November 2022, Wartono meminta Terdakwa untuk memperpanjang sewa selama 1 (satu) bulan sampai



dengan 4 Desember 2022 dengan memberikan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa, yang kemudian dibayarkan oleh Terdakwa kepada Saksi Damsinar dan Saksi Hananto;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar bulan Desember 2022, Wartono kembali meminta Terdakwa untuk memperpanjang sewa selama 1 (satu) bulan sampai dengan 4 Januari 2023 dengan memberikan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Terdakwa, yang kemudian dibayarkan oleh Terdakwa kepada Saksi Damsinar dan Saksi Hananto;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diketahui bahwa Terdakwa dan Wartono dapat menggadaikan mobil tersebut karena terdapat hubungan yang langsung dan nyata antara Terdakwa dan Wartono dengan mobil yang dikuasainya yaitu hubungan sewa, yang artinya mobil yang berada dalam kekuasaan Terdakwa dan Wartono tersebut adalah berdasarkan hubungan yang sah dan legal serta diakui oleh hukum dengan demikian unsur “**tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**” telah terpenuhi

**Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;**

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif maka apabila salah satu perbuatan telah terbukti maka keseluruhan unsur perbuatan dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang yang melakukan” (*plegen*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, termasuk apabila dilakukan lewat orang lain atau oleh bawahan orang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “yang menyuruh melakukan” (*doenplegen*) adalah pelaku perbuatan pidana yang paling sedikit ada 2 (dua) orang atau lebih yang menyuruh dan yang disuruh ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “turut serta melakukan” (*medepleger*) adalah dua orang atau lebih yang bersama-sama melakukan tindak pidana, dimana terlihat adanya kerjasama yang menyeluruh antar pelaku untuk mewujudkan tindak pidana dan kerjasama tersebut harus dilakukan secara sadar (Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Media Pustaka, Jakarta, 2003, hal 308-317) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta hukum sekitar pertengahan bulan Desember 2022, Wartono menyuruh Terdakwa untuk mengantar mobil Brio tersebut kepada Leles di TPI Tasik Agung untuk



digadaikan dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan potongan biaya administrasi dari Leles sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga hasil gadai yang diterima Terdakwa atas mobil tersebut adalah Rp37.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kemudian uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Wartono, kemudian Wartono memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan tujuan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai upah kerja menjual dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai upah uang hasil gadai;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut dapat diketahui perbuatan menggadaikan mobil tanpa izin dari Saksi Hananto yang **dilakukan oleh Terdakwa bersama Wartono**, terlihat adanya kerjasama antara Wartono yang menyuruh dan Terdakwa selaku orang yang disuruh untuk mendapatkan hasil keuntungan masing-masing dengan demikian telah terbukti subunsur “turut serta melakukan” (*medepleger*) dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, maka haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa sehingga dalam hal ini Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar surat tanda bukti gadai Nomor 13764-01-004160-6 atas nama Warsito alamat Ds. Tasikagung Rt. 001 Rw.001 Kec.Rembang Kab. Rembang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan di Unit Pegadaian Pasar (UPC) Rembang tanggal 27 Agustus 2022;

- 1 (satu) buah BPKB KBM Honda Brio warna kuning tahun 2020 dengan Nopol K-1570-VD, Noka : MHRDD1750LJ903550, Nosin : L12B32401580 atas nama Wiwik Widayati Alamat Ds. Kumendung Rt. 002 Rw. 004 Kec.Rembang Kab. Rembang;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa **Wartono Bin Radimin** maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa **Wartono Bin Radimin**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Hananto;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, **Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **M. Syafi' Ilhami bin Muntoha** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta melakukan penggelapan**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar surat tanda bukti gadai nomor 13764-22-01-004160-6 atas nama WARSITO Alamat Desa Tasik Agung RT.001 RW.001 Kec.

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rembang Kab. Rembang yang dikeluarkan di Unit UPC Pasar Rembang tanggal 27 Agustus 2022;

- 1 (satu) buah BPKB KBM Honda Brio warna kuning pekat tahun 2020 dengan Nomor Polisi : K-1570-VD, Nomor Rangka: MHRDD1750LJ903550, Nomor Mesin: L12B32401580 atas nama pemilik WIWIK WISAYATI Alamat Desa Kumendung RT.002 RW.004 Kec. Rembang Kab. Rembang.

Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa **Wartono Bin Radimin**.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang, pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2025, oleh kami, **Liena, S.H., M.Hum**, sebagai Hakim Ketua, **Jon Mahmud, S.H., M.H.**, dan **Sukmandari Putri, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Putra Ade Cahyono, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang, serta dihadiri oleh Wuryanto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

**Jon Mahmud, S.H., M.H.**

**Liena, S.H., M.Hum.**

Ttd.

**Sukmandari Putri, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Putra Ade Cahyono, S.H.**

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Rbg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22